

BAB I

PENDAHULUAN

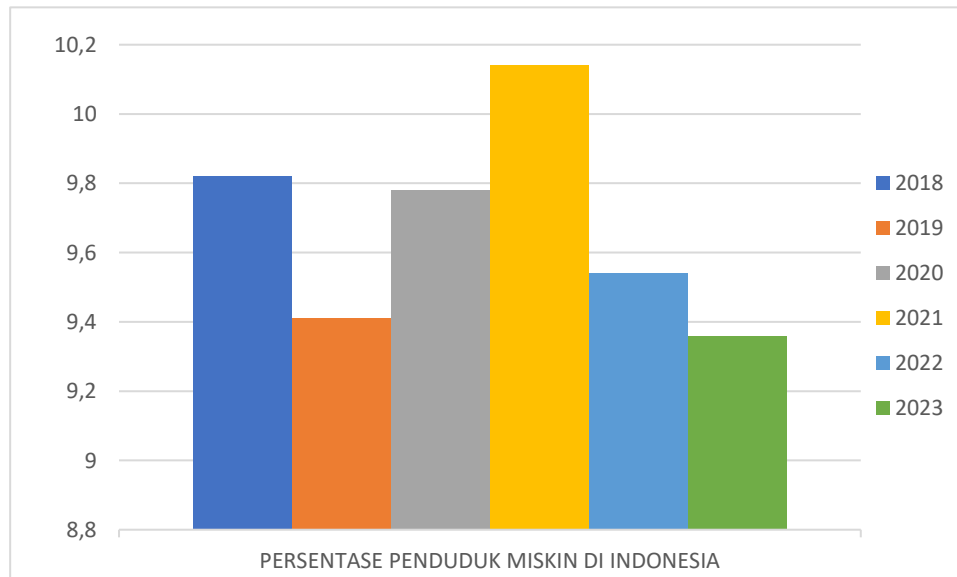
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang biasa dialami oleh semua negara di dunia. Masalah ini tidak hanya terbatas pada negara-negara berkembang atau terbelakang, tetapi juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara-negara maju. Dalam buku *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, dijelaskan bahwa kemiskinan juga terjadi di negara-negara maju, meskipun dalam bentuk dan tingkat yang mungkin berbeda dibandingkan dengan negara berkembang (Maipita, 2013). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk miskin adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Suatu kelompok masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan jika pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Endrayani dan Dewi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, merupakan masalah multidimensi. Beberapa aspek yang tercakup di dalamnya adalah kerentanan dan risiko bagi individu atau masyarakat untuk jatuh ke dalam kemiskinan, pemenuhan atau tidaknya hak dasar warga negara dan ada atau tidaknya perlakuan yang

berbeda terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Pemerintah meningkatkan investasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur setiap tahun, tetapi masih perlu dipastikan apakah ini dapat secara signifikan mengurangi persentase penduduk miskin atau justru sebaliknya. menurut Kuncoro (2007) mengidentifikasi kemiskinan dalam beberapa aspek. secara mikro, kemiskinan muncul karena ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya. Masyarakat miskin memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah. Kemiskinan itu sendiri timbul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang rendah menghasilkan produktivitas rendah dan pendapatan rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM termasuk keturunan, diskriminasi, nasib yang kurang beruntung, dan tingkat pendidikan yang rendah. kemiskinan dapat terjadi karena perbedaan cara akses terhadap modal. Beberapa aspek tersebut berkontribusi pada teori yang disebut lingkaran kemiskinan.

Tren kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan dalam jumlah dan persentase penduduk miskin selama beberapa tahun belakangan ini. Namun, terdapat beberapa periode di mana tingkat kemiskinan meningkat akibat faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut penelitian Safuridar (2017), meskipun terdapat penurunan kemiskinan, apabila distribusinya masih tidak merata, dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada gambar 1.1 disajikan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018-2023.



Gambar 1. 1 Persentase penduduk miskin di Indonesia 2018-2023

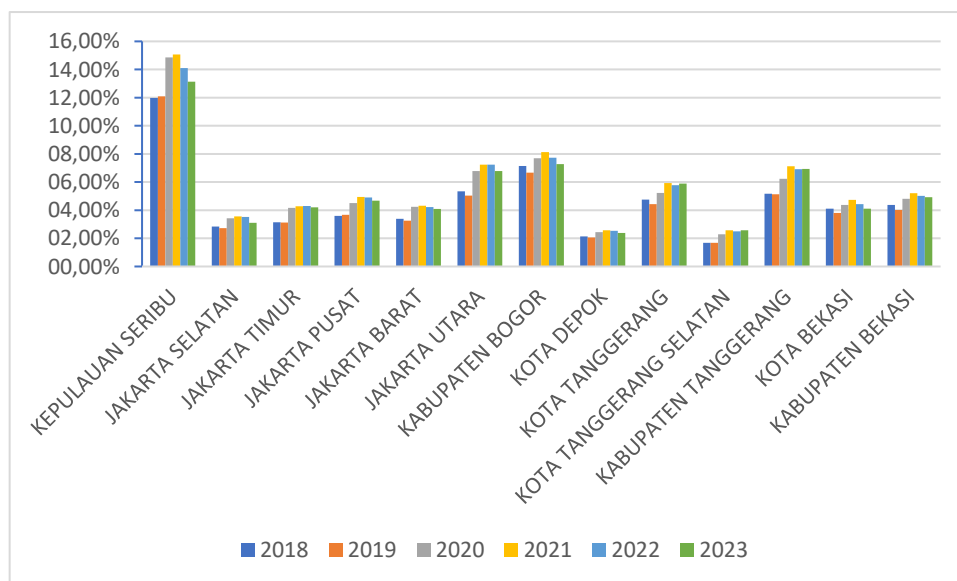
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, baik dari segi jumlah absolut maupun persentase penduduk miskin. Namun, tidak semua periode menunjukkan penurunan. Ada beberapa periode di mana terjadi peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu pada Tahun 2019-2021. Peningkatan persentase penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dapat dikaitkan dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dipicu oleh peningkatan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga ini menyebabkan biaya hidup meningkat, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang berada di ambang kemiskinan. Akibatnya, sejumlah penduduk yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai miskin menjadi jatuh ke dalam kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peningkatan persentase penduduk miskin juga terutama disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Pembatasan mobilitas penduduk yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pandemi ini juga memperburuk kondisi bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi rentan, sehingga memperluas cakupan penduduk yang jatuh ke dalam kemiskinan. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, dengan tingkat pertumbuhan PDB riil sekitar 5%. Pertumbuhan ini berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Pemerintah Indonesia memperkuat program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang ditargetkan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini berhasil meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Inflasi yang rendah pada tahun 2019 berkisar di bawah 3%, membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, karena harga barang-barang pokok tetap terkendali. Pemerintah melakukan penyesuaian upah minimum yang membantu meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Peningkatan Akses pada Layanan Kesehatan dan Pendidikan, Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang meningkatkan kualitas hidup dan daya tahan ekonomi rumah tangga miskin.

Meskipun secara umum kemiskinan di Indonesia terjadi penurunan, momen-momen tertentu menunjukkan bahwa kemiskinan masih sangat rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di dalam negeri maupun secara global (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1. 2 Persentase penduduk miskin di Jabodetabek, 2018-2023
Sumber: Badan pusat statistik, 2024

Pada gambar diatas bisa disimpulkan bahwa, Persentase kemiskinan di Kepulauan Seribu adalah yang tertinggi dibandingkan wilayah lain di Jabodetabek. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 15%, namun terlihat tren penurunan bertahap hingga tahun 2023, meskipun tetap di atas 10%. wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kelima wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang relatif stabil dan rendah, berkisar antara 2% hingga 7% sepanjang periode 2018–2023. Perubahan dari tahun ke tahun cukup kecil, mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Wilayah kabupaten bogor, wilayah ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan. dengan kenaikan di tahun 2020 sebelum mulai menurun kembali pada

tahun-tahun berikutnya. Kota Depok memiliki salah satu tingkat kemiskinan terendah di Jabodetabek, dengan persentase yang terus menurun dari tahun 2020 sekitar 2,58% menjadi 2,38% pada tahun 2023. Kota Tangerang dan kota Tangerang selatan, Kedua wilayah ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan stabil, dengan persentase berkisar antara 3% hingga 6% selama periode tersebut. Namun, ada sedikit peningkatan pada tahun 2020, kemungkinan terkait dengan dampak pandemi. Sedangkan kabupaten tanggerang memiliki Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada kota tanggerang dan kota tanggerang Selatan. Dengan Tingkat kemiskinan yang berkisar 5% sampai 7%. Persentase kemiskinan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi juga relatif rendah, dengan tren yang stabil di bawah 5%. Ada sedikit kenaikan di tahun 2020, namun kemudian kembali menurun dari tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Jabodetabek mengalami penurunan kemiskinan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2020 tampaknya menunjukkan kenaikan kecil di beberapa wilayah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, namun tren pemulihan terlihat di tahun-tahun berikutnya. Kepulauan Seribu tetap menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Kota Depok dan Jakarta Selatan memiliki tingkat kemiskinan terendah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Peneliti memilih wilayah Jabodetabek sebagai studi penelitiannya karena Jakarta sering menjadi prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT). Intervensi berbasis kota seperti program perbaikan kampung kampung juga telah membantu mengurangi kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2018). Menurut McCarthy (2017) Jika dibandingkan daerah lain program

pengentasan kemiskinan lebih sedikit dari program pengentasan kemiskinan di Jabodetabek. Semisalnya, di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kebijakannya seringkali fokus pada peningkatan ketahanan pangan. Pada gambar 1.2 persentase kemiskinan di wilayah Jabodetabek menurun tetapi penelitian ini dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kemiskinan. Walaupun angka kemiskinan di wilayah Jabodetabek menurun, karakteristik kemiskinan mungkin bisa berubah. Penelitian ini bisa mengidentifikasi apakah ada pergeseran dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin juga dapat menjadi hasil dari kebijakan atau program dari pemerintah kota atau kabupaten di wilayah Jabodetabek. Penelitian diperlukan untuk mengevaluasi apakah perubahan ini berkelanjutan dalam jangka panjang dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Jabodetabek mengalami urbanisasi dan migrasi yang pesat. Penurunan kemiskinan mungkin sebagian disebabkan oleh perpindahan penduduk miskin ke daerah sekitar Jabodetabek. Data dan analisis dari penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan. Meski kemiskinan berkurang, kebijakan yang terus diperbaharui dan didasarkan pada bukti yang diperlukan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Hampir setiap daerah atau wilayah menghadapi tantangan kemiskinan, namun masing-masing memiliki pendekatan tersendiri untuk menangani masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah di beberapa negara atau wilayah berusaha melakukan pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu perekonomian,

terutama dalam mengevaluasi hasil dari upaya pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh sebuah daerah atau wilayah. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan tambahan pendapatan atau kesejahteraan bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah terus mengalami peningkatan, maka menandakan bahwa perekonomian di daerah atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Romi dan Umiyati, 2018).

Meskipun pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, Beberapa penelitian telah mengemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. seperti Penelitian yang dilakukan oleh Eleonora *et al* (2013) mengungkapkan bahwa IPM memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam IPM, yang mencakup indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, dapat berperan penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai IPM di suatu daerah, maka kemungkinan besar tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan menurun, karena peningkatan dalam aspek-aspek pembangunan manusia cenderung memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesempatan ekonomi.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka sering kali dianggap sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Pengangguran itu sendiri

mengacu pada individu yang belum memiliki pekerjaan tetap atau mereka yang termasuk dalam angkatan kerja namun masih dalam proses mencari pekerjaan. Semakin tinggi angka pengangguran di suatu daerah, semakin mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang kurang baik, karena menunjukkan bahwa tidak semua individu yang siap bekerja telah mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai. Tingginya angka pengangguran juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian, di mana sebagian besar masyarakat hanya berperan sebagai konsumen yang mengonsumsi barang dan jasa tanpa memberikan kontribusi sebagai produsen atau tenaga kerja yang menghasilkan output ekonomi. Akibatnya, potensi produktivitas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Selain itu, dampak langsung dari pengangguran yang tinggi adalah penurunan kesejahteraan masyarakat. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, mereka tidak memiliki penghasilan yang stabil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kondisi ini membuat mereka rentan jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan, karena tanpa pendapatan yang memadai, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada individu yang menganggur, tetapi juga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan dalam Masyarakat (Widnyana & Hadiyati, 2023).

Penelitian dari Sayifullah & Gandasari (2016) dan Sembiring (2020) menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, IPM dan Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan. Pernyataan diatas tidak

selaras dengan penelitian lainnya seperti dari Krisna et al. (2023) dan Wulansari et al. (2023) Temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Pada penelitian sebelumnya masih ada kesenjangan hasil terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Sehingga penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan hasil tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Jabodetabek”**. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Jabodetabek, serta dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah Jabodetabek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah Jabodetabek?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di wilayah Jabodetabek?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di wilayah Jabodetabek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di wilayah Jabodetabek.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di wilayah Jabodetabek.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di wilayah Jabodetabek.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan serta perkembangan ilmu ekonomi terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, Tingkat pengangguran terbuka dan terhadap kemiskinan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dengan adanya kebijakan dalam beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan.